

---

---

## ADMINISTRASI PENDIDIKAN BERMUTU BERBASIS GOOD TEACHER GOVERNANCE

Jonson Rajagukguk<sup>1</sup>, Artha L. Tobing<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan

[jonson.rguk@gmail.com](mailto:jonson.rguk@gmail.com)

**ABSTRAK** : Masa depan pendidikan di negara kita sangat tergantung kepada sejauh mana kualitas dan mutu guru yang ada di negara ini. Kualitas guru yang baik akan mendorong peningkatan mutu pendidikan yang sangat signifikan. Untuk itu, perlu perencanaan yang matang, tindakan evaluatif yang sifatnya rutin dilakukan agar kita bisa melihat dan menganalisis bagaimana cara dan metode dalam mendukung mutu pendidikan yang berangkat dari kualitas guru itu sendiri. Saat ini paradigma tata kelola pendidikan sangat tergantung pada prinsip transparansi, akuntabilitas, visi dan misi yang bagus. semua ini bisa dilakukan dengan catatan adanya administrasi pendidikan bermutu Administrasi pendidikan bermutu salah satu variabel yang ingin dikembangkan adalah dengan model tata kelola guru yang baik yang disebut dengan konsep good teacher governanve. Bagaimana peran dan fungsi konsep manajemen guru yang baik sebagai upaya menciptakan konsep administrasi pendidikan bermutu di negara ini akan jadi fokus dan kajian utama dalam tulisan dan ulasan yang sifatnya deskriptif ini.

Kata Kunci: Administrasi Pendidikan Bermutu, Tata Kelola Guru

**Abstract:** *The future of education in our country is very dependent on the extent to which the quality and quality of teachers in this country. The quality of good teachers will encourage a very significant improvement in the quality of education. For this reason, careful planning is needed, evaluative actions that are routinely carried out so that we can see and analyze how ways and methods in supporting the quality of education depart from the quality of the teachers themselves. Currently, the paradigm of education governance is very dependent on the principles of transparency, accountability, good vision and mission. all of this can be done with a note that there is quality education administration. Quality education administration. One of the variables to be developed is a good teacher governance model called the concept of good teacher governance. How the role and function of the concept of good teacher management as an effort to create the concept of quality education administration in this country will be the main focus and study in this descriptive writing and review.*

**Keywords:** *Quality Education Administration, Teacher Governance*

---

---

## **PENDAHULUAN**

Administarsi pendidikan merupakan salah satu bagian atau subordinasi dari administrasi publik. Administrasi pendidikan sebagaimana yang kita ketahui bersama fokus pada upaya untuk mendorong tata kelola pendidikan yang bagus. mengingat ruh bernegara sangat tergantung pada kualitas administrasi pendidikannya, maka mutu administrasi pendidikan sangat penting didorong melalui konsep administrasi pendidikan bermutu. Salah satu upaya mendorong administrasi pendidikan bermutu ini adalah dengan cara membangun sistem tata kelola guru yang bagus, transparan, terukur dan mampu menjawab kebutuhan jaman. Mengingat guru adalah salah satu ujung tombang dalam mengelola pendidikan di negara ini.

Secara umum pengertian administrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli dapat kita lihat seperti yang dipaparkan oleh Sondang. P. Siagian (2003) Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Parajudi Atmosudirjo Administrasi adalah pengendalian dan penggerak dari suatu organisasi sedemikian rupa sehingga organisasi itu menjadi hidup dan bergerak menuju tercapainya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh administrator, yakni kepala organisasi. Willam Leffingwell dan Edwin Robinson Menurut keduanya, pengertian administrasi adalah suatu bagian dari ilmu manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan dan di mana pekerjaan tersebut harus dilakukan (Sondang P Siagian: 2003)

Membangun administrasi pendidikan bermutu berbasis pada paradigma “good teacher governance” adalah sesuatu yang sangat penting untuk dikembangkan dengan bagus. Bagaimana tata kelola guru kita (*good teacher governance*) adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Apakah tata kelola guru kita hanya tanggung jawab dinas pendidikan, Kepala Sekolah, dan PGRI semata? Bukankah perbaikan mutu guru melalui tata kelola guru secara nasional butuh “political will” dari Presiden, DPR RI, dan sampai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Tata kelola guru yang bagus merupakan cerminan luhur dari negara menghargai peradaban pendidikan yang

---

bermutu. Sudah seharusnya negara ini belajar mengelola guru dari negara Jepang di mana Kaisar Hirohito dari Jepang sangat menghargai guru sebagai jalan panjang membangun peradaban yang maju.

Berapa lagi jumlah guru kita yang tersisa? Kalimat itu keluar dari mulut sang Kaisar Hirohito kepada Menterinya saat Jepang hancur karena dibom oleh Pasuka Sekutu. Jepang pun hancur lebur dan porak –poranda. Di tengah kehancuran negara Jepang sang Kaisar bertanya jumlah guru, bukan bertanya jumlah tentara Jepang, atau profesi aparat pemerintah lainnya. Dari sini dapat kita lihat betapa sang Kaisar Hirohito sangat sadar betul bahwa kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh Guru sebagai tenaga pendidik. Guru adalah profesi yang sangat terhormat karena keilmuan, perilakunya yang harus jadi contoh bagi anak –anak didiknya, sekaligus juga bagi masyarakat sekitarnya. Saking beratnya tuntutan kepada guru, maka guru selalu senantiasa menjaga segala perilakunya agar jadi “role model” dalam ukuran perilaku berbangsa, dan juga bermasyarakat dalam kehidupan sosial.

Ditengah tuntutan yang sangat besar kepada Guru, sudah adilkah pemerintah, masyarakat kita dalam memperlakukan guru sebagai pendidik yang peran dan fungsinya tidak tergantikan oleh profesi lainnya? Tidak jarang kita dengar guru diadukan kepada polisi oleh orang tua murid karena kasus yang sangat spele. Tidak jarang kita dengar gaji guru disunat oleh pihak tertentu. Tidak jarang kita lihat guru demonstrasi hanya karena tunjangan sertifikasinya yang jadi haknya macet. Banyak lagi problematika guru yang sangat besar dan butuh solusi, minimal kita harus adil dalam memperlakukannya sebagai sebuah profesi yang sangat mulia.

Terlebih lagi saat ini pemerintah kita sedang menggaungkan sebuah mega proyek sosial dan mega proyek karakter yang kita ketahui bernama revolusi mental. Bahkan, guru sangat berperan untuk mendorong terwujudnya revolusi mental karena gurulah yang menginspirasi para siswa untuk jadi manusia yang berkarakter kuat sebagaimana harapan Presiden dan Wapres RI Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam membangun negara ini dengan konsep “nawacitanya”. Keberhasilan revolusi mental sebagai salah satu “tagline” pemerintah Joko Widodo dan Jusuf

---

Kalla sangat tergantung sejauh mana kita bisa mendidik anak, mendidik siswa, mendidik diri sendiri menjadi manusia yang beretika, manusia berempati, manusia bernurani, manusia inovatif dan kreatif, dan manusia yang bermartabat. Kualitas manusia Indonesialah yang menentukan sejauh mana revolusi mental itu bisa diwujudkan dengan baik. Bernagkat dari masalah pendidikan yang saat ini bersumber dari upaya peningkatan mutu guru maka konsep paradigma “good teacher governance” saatnya dilakukan dengan baik. Inilah yang menjadi latar belakang penulisan paper ini.

### **TUJUAN PENULISAN**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

- 1) Memberikan pemahaman tentang good teacher governance kepada publik agar ini bisa menjadi sesuatu yang familiar dalam tata kelola pendidikan kita.
- 2) Memberikan solusi dalam membangun sistem tata kelola guru yang berkelanjutan kedepan.
- 3) Membangun sistem administrasi pendidikan yang lebih baik dengan adanya kontribusi paradigma “good teacher governance.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah metode deskriptif analisis dimana penulis memaparkan secara jelas fokus masalah dengan cara kualitatif sehingga apa yang menjadi permasalahan bisa dipahami dengan baik setelah memperoleh gambaran yang jelas dengan teori –teori dan fakta yang ada di lapangan.

### **PEMBAHASAN**

Konsep atau paradigma Good Teacher Governance penulis ambil dari good governance and clean goverment. Mengingat salah satu tujuan negara adalah mengelola pendidikan sebagai salah satu sektor, maka penulis menurunkan konsep Good governance pada level yang lebih rendah. Menurut UNDP (nahif Nurcholis: 2005), pemerintahan yang baik ini punya 10 prinsip, yaitu:

- a. Partisipasi yaitu peran serta masyarakat dalam proses pembuatan keputusan juga kebebasan berkumpul dan berserikat.
- b. Aturan hukum yaitu hukum harus adil, tanpa perbedaan, ditegakkan dan dipatuhi, terutama tentang HAM.
- c. Transparan yaitu adanya kebebasan informasi dalam berbagai lembaga sehingga gampang diketahui oleh masyarakat.
- d. Daya tanggap yaitu proses yang dilakukan oleh setiap lembaga harus diarahkan ke upaya untuk melayani pihak yang membutuhkan.
- e. Berorientasi konsensus yaitu berperan sebagai penengah untuk mencapai usaha bersama.
- f. Berkeadilan yaitu memberi kesempatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan dalam usaha untuk meningkatkan kualitas hidup.
- g. Efektivitas dan efisiensi yaitu segala proses dan lembaga yang diarahkan untuk menghasilkan sesuatu benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.
- h. Akuntabilitas yaitu pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada masyarakat umum sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati.
- i. Bervisi strategis yaitu pemimpin dan masyarakat punya usaha yang luas dan berjangka panjang dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan cara memahami berbagai aspek yang ada dalam kehidupan rakyat.
- j. Saling terkait, yaitu adanya kebijakan yang saling memperkuat dan terkait dan nggak bisa berdiri sendiri.

---

Mengingat administrasi pendidikan ini adalah salah satu bagian dari administrasi publik yang mengurus hal-hak yang berhubungan dengan kepublikan, maka good teacher governance sangat penting didorong untuk membangun administrasi pendidikan bermutu. Untuk itu, administrasi pendidikan melalui konsep good teacher governance adalah bagian dari kebijakan publik untuk mendorong mutu pendidikan nasional yang lebih baik. Memahami good teacher governance yang lebih baik sebagai kebijakan publik dalam skala lebih kecil, maka kita harus memahami apa itu kebijakan publik itu sendiri.

Smith dan Larimer (2009) menyatakan “*there is not a field of public studies, there are fields-plurals-of public policy studies*” (ini bukan tentang bidang studi tentang kebijakan publik, ada bidang-jamak-dari studi kebijakan). Berdasarkan perspektif ini baik konten maupun konteks kebijakan publik itu akan selalu di anggap sebagai bersifat plural, dan karena itu masalah-masalah kebijakan (*policy problem*) pun sebagai sebuah *academic enquiry* (permintaan akademik) tidak hanya menjadi minat para ahli disiplin ilmu tertentu yang mempelajari atau mendekatinya secara monodisiplin. Itu pula sebabnya, sudah sejak lama masalah-masalah kebijakan itu menjadi arena pergumulan dari para ahli dari bermacam disiplin ilmu sosial yang sengaja mengorientasikan diri pada kebijakan (*policy oriented*) dan yang pelajari atau menelitinya secara interdisiplin (*interdisciplinary approach*).

W.I. Jenkis (1978:15), merumuskan kebijakam publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut.

Menurut Young dan Quinn dalam (Edi Suharto 2005:44), kebijakan publik adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada

---

umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Menurut Lemieux dalam (Solichin Abdul Wahab 2012:15), kebijakan publik adalah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu. Menurut Chief.J.O.Udoji dalam (Solichin Abdul Wahab 2012:15), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Menurut Wilson dalam (Solichin Abdul Wahab 2012:13), kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan- pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah- langkah yang telah/ sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Menurut Leo Agustino (2008:8) kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Menurut Dye dalam (Arifin Tahir 2014:20), Kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Pakar Prancis, Lemieux (1995:7) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut :*“The product of activities aimed at the resolution of public problem in enviroment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time”* (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu. Dari perbincangan tentang definisi kebijakan publik di atas, kini kita dapat menyadari bahwa semua pembuatan kebijakan publik (policy making) itu akan selalu melibatkan pemerintah dengan cara tertentu

Terlepas daripada itu, dalam hal mewujudkan revolusi mental yang implementatif, maka pendidikanlah satu-satunya jalan (*education is the only way*) yang masih dipercaya dan jalan

---

yang paling utama. Tetapi sejauh mana pendidikan kita yang ditopang oleh guru mampu mewujudkan revolusi mental ini? Sementara perhatian guru dan perlakuan guru oleh pemerintah masih sangat rendah? Inilah permenungan hari guru sebagai moment yang sangat bagus bagi guru yang kita kenal pahlawan tanpa tanda jasa.

Visi dan misi Ki Hadjar Dewantara mengenai pembentukan masa depan sebuah bangsa melalui pendidikan sungguh hebat, dan peran guru tidak bisa dinafikan. Ki Hadjar Dewantara melihat masa depan Indonesia bisa cerah hanya dengan pendidikan. Pemikiran Ki Hadjar Dewantara ini merupakan pemikiran manusia Indonesia dulu yang hidup jaman penjajahan. Dari sini dapat kita lihat betapa manusia Indonesia dulu sudah berpikir bagaimana membangun dunia pendidikan yang bermutu. Spirit kependidikan oleh Ki Hadjar Dewantara justru mengalami degradasi saat ini. Para petinggi bangsa ini, mulai dari level Menteri, DPR, pejabat daerah, politisi lokal seolah –olah menganggap pendidikan hanya sebagai rutinitas dan sangat lemah dalam melihat profesi pendidikan (Guru).

Pengelolaan pendidikan sebagai sebuah institusional atau sistem satuan pendidikan merupakan suatu proses untuk merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi.

Ada enam bagian tata kelola administrasi pendidikan yaitu;

- a. Kurikulum; Kurikulum merupakan segala bentuk kegiatan yang mendukung terjadinya proses pembelajaran secara komprehensif yang terencana dan terorganisir.
- b. Peserta didik, peserta didik adalah subjek pendidikan yang merupakan pelaku pendidikan yang melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan mekanisme kegiatan belajar yang telah direncanakan.
- c. Tenaga pedidik atau guru dan tenaga kependidikan.
- d. Dalam melaksanakan tata kelola administrasi pendidikan membutuhkan sektor pendanaan baik untuk pengadaan, pemeliharaan, ataupun pembinaan



- 
- e. Dalam melaksanakan program kegiatan pembelajaran membutuhkan sarana dan prasarana baik berupa gedung, alat pendidikan konvensional ataupun alat pendidikan teknologi, dan lainnya yang nantinya akan menopang jalannya proses pembelajaran.
  - f. Lingkungan merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan, mulai dari keadaan sosial budaya, ekonomi, ideologi, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat pada umumnya (Nur Jamal & Masykurotus Syarifah: 2011, <http://download.garuda.ristekdikti>)

Bagaimana mendorong administrasi pendidikan yang bermutu tentu harapan dari pengelola negara. Untuk itu, administrasi pendidikan yang bermutu harus mampu mendorong tata kelola guru yang lebih bagi secara holistik melalui peran dan paradigma manajemen kepublikan dengan konsep ‘good teacher governance’. Kata kunci dalam peningkatan mutu pendidikan adalah mutu guru. Maka mengelola guru dengan mengadopsi prinsip turunan good government adalah sesuatu yang musti dilakukan karena ini akan berpengaruh besar pada upaya peningkatan mutu pendidikan kita.

Administrasi pendidikan yang kurang bagus selama ini telah membuat mutu pendidikan rendah. Akibatnya dunia pendidikan kita adalah dunia carut marut, dunia tambal sulam, dunia gonta- ganti kurikulum, dunia percobaan yang tidak punya rancang bangun yang jitu berkelanjutan untuk mendorong nafas kemajuan bangsa. Apakah sebuah bangsa bisa maju tanpa dunia pendidikannya yang maju yang ditopang oleh guru? Tidakkah negara ini bisa belajar kepada negara Malaysia yang sangat serius dalam membenahi pendidikannya dan kesejahteraan tenaga pendidiknya (*welfare educators*), konsekuensinya Malaysia sekarang berlayar dalam dunia kemajuan yang seolah tiada bertepi. Kita sungguh jauh tertinggal dari saudara serumpun kita ini. Inilah sebuah permenungan khusus bagi para pembuat kebijakan bangsa, agar punya “full commitment” pada dunia pendidikan sebagai upaya menggapai kemajuan untuk kebaikan bersama (*public good*).

---

Pendidikan satu-satunya jalan mengangkat derajat, martabat, harkat dari sebuah bangsa dan guru adalah ujung tombak kemajuan pendidikan. Hanya pendidikanlah satu-satunya kata kunci untuk bisa memajukan peradaban sebuah bangsa. Apakah peradaban ekonomi, peradaban politik, peradaban teknologi dan lain sebagainya. Semua kemajuan (*all advances*), kesejahteraan (*welfare*), ketertiban (*order*) merupakan “out put” dan “out come” dari proses pendidikan (*education process*). Apa yang dicapai oleh negara Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan dewasa ini merupakan buah manis dari pendidikan yang mereka jalankan.

Selama ini, pendidikan tidak dilaksanakan dalam konteks yang tepat bagaimana membangun karakter, keahlian, transfer teknologi, dan menanamkan nilai pada semua manusia Indonesia. Bahkan oleh anak didik pendidikan sudah menjadi beban bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan mahalnya uang sekolah, munculnya UN yang menjadi masalah, Kurikulum yang sangat berat, dan sampai masalah ketak bengek lainnya. Pendidikan kita mengarah pada komersialisasi dan rutinitas oleh pemerintah. Akhirnya out put dan out come pendidikan kita tidak berpengaruh signifikan pada kemajuan bangsa ini karena stagnanisasi sumber daya manusianya. Bagaimana mengakhiri komersialisasi, rutinitas, dan beban berat dalam dunia pendidikan kita?

Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apa yang membuat sebuah bangsa bisa maju, beradab, santun, berbudi pekerti, dan punya masa depan yang cerah? Tidak ada jawaban selain pendidikan, pendidikan, dan pendidikan. Mother Theresia, tokoh kemanusiaan dari negara India sudah mengingatkan kita semua bahwa akar dari segala kemiskinan adalah kebodohan (*ignorance*). Karena kebodohanlah manusia menjadi miskin. Maka pendidikan sangat punya peran sentral memangkas kebodohan.

Melalui desain pendidikan yang benar sebuah bangsa akan menggapai kemajuan ekonomi yang sehat dan berkualitas. Malaysia sudah membuktikannya dengan pendidikan yang mereka terapkan bangsanya bisa punya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Sekarang Malaysia menjadi negara yang kuat secara ekonomi dan

---

jauh meninggalkan kita. Banyak tenaga kerja dari negara ini menggantungkan hidupnya di negara Malaysia. Konsep Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah mendunia. Sedangkan tenaga kerja Malaysia (TKM) belum ada kita lihat sampai hari ini. Ini merupakan kegagalan dunia pendidikan kita juga.

Melalui pendidikan sebuah bangsa akan mengalami kemajuan demokrasi yang luar biasa. Amerika Serikat sudah membuktikannya. Perpolitikan yang sehat dengan prinsip negara demokratis dibangun atas dasar kesadaran rakyatnya. Elite politik di negara Amerika Serikat tidak perlu mengeluarkan cost politik yang sangat besar dalam pemilu karena praktik money politic sudah tidak dijumpai lagi disana. Rakyat akan melihat mana sosok yang berkualitas.

Sangat beda dengan negara kita. Negara kita terjerambab pada praktik money politics dalam sistem politik yang sedang kita bangun karena dukungan rakyatnya yang mau menerima suap dan sogok. Melalui pendidikan sebuah bangsa akan mampu membumikan supremasi hukum yang mantap. Keadaban orang barat dalam berlalu lintas misalnya karena masyarakatnya sudah cerdas. Mereka sangat taat pada hukum berlalu lintas. Tidak ada negara yang bisa maju kalau hukumnya tidak dibenahi. Maka andil pendidikan sangat besar. Melalui pendidikan sebuah bangsa bisa mengembangkan teknologi untuk peradabannya sendiri. Kemajuan negara Jepang dan Korea Selatan dalam bidang IPTEK bukan dengan sulap.

Tetapi melalui pendidikan. Restorasi Meiji sebagai konsep awal kemajuan Jepang bermula dari pendidikan. Jepang mengirim putera-puterinya untuk belajar di negara luar. Setelah pintar mereka tarik kembali ke negaranya. Inilah dasar pemikiran restorasi Meiji yang berhasil mengangkat harga diri Jepang di dunia saat ini. Melalui pendidikan sebuah bangsa akan bisa melepaskan dirinya dari ketergantungan pada bangsa asing. Bangsa Jepang sudah membuktikan bangsanya maju hanya karena dunia pendidikan yang sangat diseriusinya.

Eksploitasi alam negara kita saat ini merupakan kegagalan kita sendiri karena kita tidak mampu. Banyak perusahaan tambang beroperasi di negara kita karena kesalahan kita sendiri.

---

Pendidikan ibarat sebuah jantung bagi negara. Pendidikanlah yang memompakan darah kemajuan pada sebuah bangsa. Jika jantung berhenti, maka kemajuan juga akan berhenti. Bangsa kita bisa merdeka karena pendidikan. Ini sudah dibuktikan. Perlawanan raja-raja daerah mengalami kegagalan karena kurangnya dukungan SDM. Perjuangan fisik yang dilakukan oleh raja-raja daerah tidak cukup ampuh untuk mengusir pemerintah kolonial Belanda karena kesalahan strategi atau karena mengandalkan otot dalam melawan pemerintah kolonial Belanda sehingga bangsa kita terus mengalami penjajahan yang sangat mengerikan.

Model perjuangan fisik diganti dengan Orientasi perjuangan diplomasi dengan mengedepankan nilai-nilai intelektual (Pendidikan). Ini dimulai dari munculnya gerakan kebangkitan nasional (kebangkitan rasio) oleh sekelompok kecil tokoh-tokoh Indonesia kala itu. Pelopornya adalah manusia yang sudah berpendidikan. Mereka mengedepankan nilai pemikirannya dalam memperjuangkan bangsa ini supaya bebas dari penjajahan Belanda. Terlepas mereka mengecap pendidikan barat. Perjuangan mengedepankan intelektuallah melalui tokoh-tokoh terpelajar seperti Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Ir. Sukarno, Sutan Syahrir bangsa kita mampu merdeka dari jajahan Belanda. Mereka terus melakukan loby dengan dunia luar dan meyakinkan mereka bahwa penjajahan Belanda merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang universal .

Apa yang dilakukan oleh Sukarno dkk merupakan bentuk perjuangan intelektual. Ini sangat ampuh dan membuat pemerintah kolonial Belanda kerepotan. Apa yang dilakukan dan diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara sungguh sangat mulia. Beliau memelopori pendidikan di negara RI bagi rakyat miskin. Berdirinya perguruan Taman Siswa di Yogya merupakan momentum sekaligus ungkapan bagi masyarakat Indonesia kala itu untuk bisa mengecap pendidikan. Perjuangan Ki Hajar Dewantara sudah sepatutnya pantas kita contoh sebagai upaya memajukan bangsa ini melalui sektor pendidikan seperti yang dilakukan oleh beliau sejak dulu tanpa mengenal rasa lelah. Ditangan pemerintah kita saat ini, pendidikan kita mengalami keterpurukan yang sangat parah. Padahal anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari

---

total APBN sudah seharusnya mampu menaungkan mutu pendidikan di negara ini. Ini tidak. Korupsi dalam dunia pendidikan justru menguat. Dimana-mana dana sertifikasi guru tertahan oleh pemerintah. Disatu sisi pemerintah pusat mengatakan sudah mencairkan dana sertifikasi kepada Dinas Pendidikan daerah. Tetapi semua guru melakukan unjuk rasa karena dana sertifikasinya belum cair. Ini hanya sekelumit masalah dari berbagai permasalahan di sekitar dunia pendidikan kita yang butuh solusi menyeluruh yang jadi renungan pada hari guru ini.

Bagaimana membangun dunia pendidikan yang lebih baik dan ditopang oleh kualitas guru yang mumpuni sudah seharusnya tugas utama (*main task*) yang harus didahulukan oleh pemerintah kita saat ini. Perlu sebuah “grand desain” untuk membangun peradaban bangsa dengan mempertajam visi dan misi pemerintah mengenai profesi guru. Terlebih lagi saat ini berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jumlah Guru Mencapai 3.015.035 , dan sebanyak 2.294.191 adalah PNS dan selebihnya adalah Guru Yayasan. Jumlah guru lebih kurang 3 jutaan ini dituntut untuk memiliki empat jenis kompetensi, yakni pedagogi, professional, social, dan pribadi. Berdasarkan hasil Ujia KOMPETENSI Guru (UKG) hanya 192 Guru dari 1,9 Jutaan Guru yang mendapat nilai di atas 90. Bahkan, rata-rata pedagogic berdasarkan data UKG 2015 adalah 56,69 persen, (*Kompas, 21/11/2016*).

Ini merupakan sebuah gambaran dan pukulan yang sangat telak bagi kita betapa kualitas guru kita sangat memprihatinkan. Tetapi ini adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah harus punya grand desain bagaimana mendorong kualitas guru yang lebih baik. Tata kelola mutu guru, setidaknya visi dan misi menciptakan kualitas guru haruslah jauh kedepan mengingat peranan guru sangat besar dalam membangun peradaban (*build civilizations*). Dengan guru yang berkualitas maka pendidikan bermutu juga bisa kita wujudkan. Pendidikan adalah segalanya. Hanya dengan pendidikan yang berkualitaslah kita bisa menjadi bangsa yang bermartabat dan berkarakter, serta bisa punya harga diri (*pride*) dalam pergaulan internasional (*international association*) dengan menjadikan bangsa ini sejajar dengan bangsa lain (*make this nations equal with other nations*) . Setidaknya kita tidak kalah dengan Malaysia dan Singapura.

---

Sekali lagi, harus kita tegaskan, tanpa pendidikan yang berkualitas, martabat sebuah bangsa tidak bisa terangkat. Satu-satunya jalan untuk memperbaiki nasib bangsa, kesejahteraan masyarakat hanyalah melalui pendidikan. Bagaimana menanamkan kesadaran kolektif bagi pemerintah supaya jangan lagi melihat pendidikan hanya sebelah mata merupakan hal yang sangat urgen untuk dilakukan. Sebab, hanya pendidikanlah satu-satunya jalan dalam mengangkat kehidupan sebuah bangsa pada peradaban yang lebih baik. Baik peradaban ekonomi (*economic civilizations*), politik, hukum, sosial budaya dan teknologi. Tentu kata kuncinya dimulai dari komitmen yang disertai visi dan misi yang jelas pada perbaikan kualitas guru sebagai ujung tombak (*spearhead*) dan mesin penggerak utama (*prime mover*) untuk memajukan dunia pendidikan (*improve education*) menuju bangsa yang beradab (*civilized nations*).

## **PENUTUP**

Administrasi pendidikan bermutu sangat penting dilakukan dengan berbasis pada pengelolaan guru yang baik. Administrasi pendidikan sebagai salah satu dari administrasi negara atau administrasi publik musti mampu melahirkan kebijakan publik yang baik. Salah satu kebijakan publik yang baik untuk guru adalah dengan mendorong tata kelola guru yang baik, mulai dari perencanaan pendidikan guru, penempatan guru, evaluasi kinerja guru yang semuanya dimasukkan dalam salah satu paradigma yang baru, yaitu *good teacher governance* sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu guru yang baik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di negara ini untuk jangka panjang yang berkelanjutan dan sesuai UUD 1945.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Wahab, Solichin (1997) *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi keimplementasi Kebijakan Negara*. Penerbit PT Bumi Aksara Jakarta.

-----, (1998) *Analisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasinya*. Penerbit Fakultas Ilmu Administrasi Univ. Brawijaya Semarang.

Christopher Larimer, dan Smith, Kevin B. r, *The Public Policy Theory Primer*, 2009

---

Dunn, Willian.N (1981) *Public Policy Analysis : An Introduction*. Prentice-Hal,Inc., Englewood Cliffs,N.J.07632. USA.

-----, (1992) *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Penyadur: Muhajir Darwis. Penerbit PT. Hanindita Yogyakarta.

-----, (2000) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Diterjemahkan oleh: Samodra Wibawa, dkk Penerbit Gajah Mada University.

-----, (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Diterjemahkan oleh Samodra Wibawa,dkk. Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta.

Dye, Thomas R. (1987) *Understanding Public Policy*. Prentice- Hall, INC., Englewood Cliffs, NJ. USA.

-----, (1976) *Policy Analysis : What Governments Do, Why They Do It, and What Difference it Makes*. The University of Alabama Press.

Hanif, Nurcholis, *Teori dan Prak k Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2005),

Siagian, Sondang P, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Rineka Cipta, 2003.

Nur Jamal & Masykurotus Syarifah: 2011, <http://download.garuda.ristekdikti>